



## Dewan Bali Minta Bupati Buleleng

### Revisi Kenaikan Tarif TNBB

**DENPASAR** – Kebijakan pengelola Taman Nasional Bali Barat (TNBB) untuk menaikkan tarif masuk bagi wisatawan memantik reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Reaksi dewan atas kenaikan tarif TNBB bagi wisatawan itu, karena khawatir bisa berdampak serius bagi kunjungan wisatawan.

Hal ini ditegaskan salah satu anggota Komisi I DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi. Saat dikonfirmasi, kemarin (4/8), politisi Partai Golkar asal Buleleng ini mendesak agar kenaikan tarif masuk TNBB direvisi. "Bupati Buleleng harus berani bersikap sikap tegas terhadap pengelola TNBB yang menaikkan retribusi masuk kawasan TNBB



DIDIK DWIPRPTONORADAR BALI

**UNTUK RAKYAT: Anggota Komisi I DPRD Bali IGK Kresna Budi.**

tersebut. Jangan tutup mata terhadap jeritan rakyat yang kena dampak kebijakan itu," tegas Kresna Budi di DPRD Bali.

Ditambahkan, akibat kenaikan tarif TNBB dari sebelumnya Rp 20 ribu per orang menjadi Rp

200 ribu per orang itu dinilai sangat meresahkan. "Semenjak berlakunya kenaikan retribusi itu, kunjungan wisatawan kesana mulai menurun," ungkapnya.

Sehingga, kata Kresna Budi, harus segera dicarikan solusi. Apalagi, lanjutnya, sejak pemberlakuan kenaikan tarif TNBB, pendapatan warga yang sebelumnya bekerja sebagai pemandu wisata, nelayan yang juga pengantar wisatawan untuk menyeberang ke Pulau Menjangan, Desa Grogak, Buleleng menurun drastis.

Menurutnya, kebijakan pengelola TNBB memungut retribusi yang tinggi tersebut sangat berlebihan, sebab dampak negatifnya dirasakan langsung masyarakat setempat yang ber-

gantung dari sektor pelayanan jasa pemandu wisatawan.

Termasuk, selaku wakil rakyat yang duduk di dewan Bali mempertanyakan alasan pengelola TNBB menaikkan retribusi tersebut sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan taman tersebut. Sebab, ia tidak menjamin tarif tinggi akan menjamin kawasan itu lebih aman. "Hal ini yang perlu dipertimbangkan pengelola TNBB. Apalagi pengelola TNBB tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat. Yang membuat dermaga penyeberangan perahu tersebut adalah kelompok nelayan setempat. Mestinya pengelola TNBB ikut serta membangun fasilitas untuk memudahkan wisatawan kesana," pungkasnya. (adv/pr)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 24



**KESEHATAN**

**Empat Kontraktor Lirik RS Pratama**

**SINGARAJA** – Pembangunan Rumah Sakit Pratama alias rumah sakit tanpa kelas di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, rupanya dilirik banyak kontraktor. Sejak dibuka pada awal bulan, sudah ada empat perusahaan konstruksi yang melayangkan penawaran kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buleleng. Empat perusahaan yang disebut melakukan penawaran itu antara lain PT. Aneka Jasa Pembangunan dengan nilai penawaran Rp 21,9 miliar, PT. Asri Cipta Natha Alam dengan nilai penawaran Rp 22,1 miliar, PT. Trijaya Nasional dengan nilai penawaran Rp 23,4 miliar, serta PT. Tunas Jaya Sanur yang notabene pemenang tender pembangunan IRD RSUD Buleleng dengan nilai penawaran Rp 24,45 miliar.

Saat ini Pemkab Buleleng mulai meratakan dua bangunan yang dulunya asset Pemprov Bali, setelah mendapatkan hibah asset dari Pemprov. Dua bangunan itu sebelumnya digunakan sebagai mes petugas Balai Benih Utama (BBU) Padi, serta gedung penyimpanan peralatan. Ketua ULP Barang dan Jasa Pemkab Buleleng, Ida Bagus Surya Bratha mengatakan, proyek pembangunan RS Pratama memang sudah masuk di ULP. “Prosesnya masih panjang. Kemungkinan pertengahan September nanti sudah selesai semua. Sekarang kami masih verifikasi berkas dan dokumennya,” kata pria yang akrab disapa Gus Surya itu.

Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra yang ditemui terpisah, menyatakan RS Pratama harus diselesaikan selambat-lambatnya akhir tahun 2015 ini. Apalagi pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar melalui APBN. “Targetnya tahap awal bisa beroperasi 50 tempat tidur, dan akan kami tambah terus. Untuk alkes, kami mulai lengkapi tahun anggaran 2016,” tegas Sutjidra. (eps/gup)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 29



## Radar Bali



ARI TEJA/RADAR BALI

**SAKSI MAHKOTA** : Mantan Kadis PU Karangasem Wayan Arnawa saat memberikan kesaksian, kemarin.

# Sudutkan Konsultan

## Hakim Kejar Proses Tender hingga PT Adhi Karya Menang

**DENPASAR** - Kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dilanjutkan sidangnya, dengan terdakwa Mantan Kepala Divisi PT Adhi Karya Imam Wijaya Santosa, di Pengadilan Tipikor, Denpasar, kemarin (4/8). Yang hadir menjadi saksi adalah saksi mahkota Wayan Arnawa. Arnawa adalah Mantan Kadis PU Karangasem dan Pengguna anggaran yang menjadi terdakwa yang sudah divonis dalam kasus yang sama.

Sidang dipimpin oleh hakim Ketua Ketut Gede Hariadi, dengan hakim Anggota Patensili dan Sumali. Sedangkan terdakwa Wijaya Imam Santosa didampingi oleh pengacara Edi Hartaka, dan jaksa Made Subawa menghadirkan saksi mahkota Arnawa. Dalam kesaksiannya, hakim mengejar lagi penentuan pemenang. Lan-

taran jelas bahwa, yang semestinya menang adalah PT Waskita Karya, sedangkan Pt Adhi Karya adalah pemenang cadangan satu. "Apa pertimbangan anda malah memenangkan PT Adhi Karya," ungkap hakim Hariadi.

Saksi menjelaskan bahwa, memang mengacu aturan - aturan yaitu PP 29 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dan Peraturan Lembaga (Perlem) Gapensi. Alasan ini dianggap tidak kuat, lantaran Perlem bukan produk pemerintah. "Perlem itu bukan produk pemerintah, kok bisa dipakai acuan," sódok Hakim Sumali.

Bahkan kemudian Arnawa mengatakan bahwa keuangan dari PT Waskita juga tidak bagus. Karena ada kasus penggelapan hingga Rp 500 miliar. Namun informasi ini hanya didapat dari berita. Kesaksian Arnawa ini membuat hakim Patensili mulai bersuara keras. "Anda yang tegas, yang jelas. Apa sebenarnya alasannya, sampai-sampai berani

mengganti pemenang," hardik Patensili. "Kok hanya berani dari acuan berita koran mengganti pemenang," bentaknya lagi.

Namun kembali penjelasan Arnawa muter-muter di sana saja. Terkait dengan pelaksanaan atau pipa yang tipis, Arnawa menuding bahwa itu kesalahan Konsultan Pengawas. Dia mengatakan untuk pengawasan sudah ada konsultan pengawas. Karena sudah dipastikan sesuai makanya berani mencairkan. "Konsultan pengawas, saya bekerja dan mencairkan berdasarkan konsultan pengawas," tudingnya "mengigit" konsultan pengawas.

Tak hanya itu, terkait dengan penunjukan langsung tambahan dana Rp 3 miliar lebih juga dikerjakan. Namun Arnawa bersikukuh mengatakan bahwa itu sah, karena proyek lanjutan. (art/han)

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 24